



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMMAD MAHFUDZ**
2. Jabatan : **CAMAT**
3. NHK : **748240**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 460 m2/460 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/500 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/1000 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 365.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
3. MOTOR, HONDA MEGA PRO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOTOR, HONDA SUPER CUP Tahun 1983, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
6. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000



7. MOTOR, VESPA VESPA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 353.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 450.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.868.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.868.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.